

---

## Pengakuan Akuntansi Hibah Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2020

Nadira Zahra Alifia<sup>1</sup>, Nailah Artanti<sup>2</sup>, Ni Made Dinda Savitri Utami<sup>3</sup>, Riska Aulia Salsabila Fadhly<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Telkom

E-mail: nadirazahraa@student.telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, nailahartanti@student.telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>,  
nimadedinda@student.telkomuniversity.ac.id<sup>3</sup>, riskaauliasf@student.telkomuniversity.ac.id<sup>4</sup>

---

### Article History:

Received: 01 Juli 2022

Revised: 08 Juli 2022

Accepted: 11 Juli 2022

**Keywords:** *Financial Statements, Government Assistance, Government Grants, PSAK 61*

**Abstract:** *PSAK 61 is an accounting standard that explains the accounting for government grants and disclosure of government assistance. This study aims to determine the accounting recognition of grants contained in the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. The object used in this research is PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. This research is an exploratory research with a wider scope of research. The type of data in this study is descriptive or in the form of a description. This study uses secondary data sources with descriptive analysis method. The results of this study explain that government grants received by PT Bank Lampung have been prepared in accordance with the provisions in PSAK 61 through the income method.*

---

## PENDAHULUAN

Tingkat perkembangan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh yang besar dalam suatu negara. Sektor publik merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi atau entitas khususnya pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial. Pengelolaan dana yang baik tentu membutuhkan kerjasama dan interaksi dengan pihak lain termasuk negara lain, organisasi internasional, perusahaan, dan masyarakat. Menurut Buletin Teknis SAP Nomor 13 kerjasama dan interaksi tersebut dapat berbentuk pemberian bantuan yang bersifat mengikat seperti pinjaman dan bantuan yang bersifat tidak mengikat seperti hibah. Agenda bantuan dan hibah memiliki kaitan yang erat dengan belanja hibah dalam pemerintah. Belanja hibah berhubungan dengan pengelolaan dana negara dan daerah yang dimulai dari tahap penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban.

Hibah dan bantuan pemerintah diatur dalam PSAK 61 tentang 'Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah' yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 November 2010. PSAK 61 juga telah dilakukan penyesuaian dan disahkan kembali pada tanggal 27 Agustus 2014. Ruang lingkup PSAK 61 dapat diterapkan dalam akuntansi, pengungkapan hibah pemerintah, dan bentuk lain dari bantuan pemerintah. Pemberian atau penerimaan hibah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam aturan keuangan negara, karena bagian dari pendapatan dan belanja negara. Selain tanggungjawab, aspek akuntansi, aspek pengeluaran atau penerimaan dana

dan penganggaran serta pertanggung jawaban kepada pelaksana kepentingan juga perlu diperhatikan.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank Lampung. Bank Lampung didirikan dengan maksud menyokong dan merangsang pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Visi PT Bank Lampung adalah 'Menjadi BPD komersial yang dapat bersaing dengan fokus pada pengembangan UMKM dalam partisipasi terhadap pembangunan daerah'.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan hibah pemerintah?
2. Apa yang dimaksud dengan bantuan pemerintah?
3. Bagaimana pengakuan akuntansi hibah pemerintah terhadap laporan keuangan PT Bank Lampung?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hibah pemerintah.
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bantuan pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengakuan akuntansi hibah pemerintah terhadap laporan keuangan PT Bank Lampung.

## **LANDASAN TEORI**

### **Hibah Pemerintah**

PSAK 61 dalam paragraf 03 mendefinisikan hibah pemerintah sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pengubahan sumber daya kepada entitas sebagai kompensasi di masa lalu atau masa depan yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas pada kondisi tertentu. Bantuan pemerintah yang tidak mempunyai nilai yang memadai bagi entitas tidak dapat disebut sebagai hibah pemerintah, begitu pula dengan transaksi pemerintah yang tidak berbeda dari transaksi perdagangan normal entitas. Hibah pemerintah dapat diakui pada bagian laba rugi sebagai beban atas biaya terkait yang ditafsirkan atau dikompensasikan dengan hibah atau sebagai piutang yang merupakan kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi. Menurut PSAK 61, hibah pemerintah dapat dikelompokkan mejadi dua, yaitu :

1. Hibah yang Terkait dengan Aset  
Hibah yang terkait dengan aset perlu memenuhi syarat untuk melakukan pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang. Selain itu juga perlu ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset selama aset tersebut diperoleh atau dimiliki.
2. Hibah yang Terkait dengan Penghasilan  
Hibah pemerintah yang tidak termasuk dengan aset.

### **Hibah Pemerintah Nonmoneter**

Hibah pemerintah nonmoneter dapat berbentuk seperti tanah atau sumber daya lain, untuk digunakan oleh enitas. Pada kondisi ini diperbolehkan untuk menentukan nilai wajar aset nonmoneter dan mencatat hibah dan aset tersebut pada nilai wajar. Untuk memudahkan pengguna, aset dan hibah dapat dicatatkan bedasarkan jumlah nominal.

### **Penyajian Hibah yang Terkait dengan Aset**

Hibah pemerintah yang terkait dengan aset termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar

---

disajikan sebagai penghasilan ditanggihkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset.

### **Penyajian Hibah yang Terkait dengan Penghasilan**

Hibah yang terkait dengan penghasilan biasanya disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif, baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti “penghasilan lain-lain” atau sebagai pengurang dalam beban terkait.

### **Bantuan Pemerintah**

PSAK 61 menjelaskan bantuan pemerintah sebagai usaha dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan manfaat ekonomi khusus kepada satu entitas atau beberapa entitas yang memenuhi kapabilitas tertentu. Bantuan pemerintah untuk tujuan pernyataan ini tidak mencakup manfaat yang diberikan secara tidak langsung melalui tindakan yang mempengaruhi kondisi perdagangan umum, seperti penyediaan pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing. Contoh bantuan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya adalah saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan secara cuma-cuma dan ketentuan penjaminan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan studi dengan melakukan penelusuran terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup yang penelitian lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar (Yusuf, 2017). Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi tujuan dalam penelitian dan jangkauan konseptual yang lebih luas. Penelitian eksploratif bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi penelitian yang diperlukan sehingga peneliti dapat memahami situasi permasalahan yang terjadi dengan baik.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau urutan yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan dan Merumuskan Masalah

Pada tahap ini peneliti mendefinisikan dan merumuskan masalah yang berhubungan dengan hibah pemerintah pada laporan keuangan bank Lampung sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

2. Melakukan Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperlukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan topik dan permasalahan yang diteliti agar hasil penelitian dapat tersaji dengan baik. Peneliti memperoleh informasi melalui penelitian-penelitian terdahulu serta laporan keuangan yang mendukung penelitian ini.

3. Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan jawaban atas masalah yang ingin dikaji serta sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.

4. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT Bank Lampung tahun 2020.

**5. Menyajikan Informasi**

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menguraikan tentang pengungkapan akuntansi hibah pemerintah terhadap laporan keuangan PT Bank Lampung tahun 2020.

**6. Membuat Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian dengan menarik intisari yang disajikan dalam penelitian ini.

**Metode Pengumpulan Data****Jenis Data**

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang bersifat deskriptif atau berbentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka).

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dipublikasikan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat luas. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu PSAK 61, laporan keuangan PT Bank Lampung, serta data lain yang mendukung penelitian ini.

**Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan informasi lebih detail mengenai pengungkapan hibah pemerintah pada laporan keuangan pada PT Bank Lampung.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

PSAK 61 (Revisi 2010) "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah" yang berlaku efektif 1 Januari 2012 telah diterapkan secara prospektif oleh PT Bank Lampung. PT Bank Lampung memperoleh hibah dari pemerintah daerah Lampung Timur berupa tanah pada tahun 2012 yang telah tercatat dalam laporan keuangan tahun 2020. Berdasarkan pengakuan hibah tersebut, PT Bank Lampung telah mengikuti ketentuan PSAK 61 (Revisi 2010), "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah". Perlakuan akuntansi untuk hibah yang berasal dari pemerintah dipaparkan dalam Catatan 20.

Pengakuan hibah dalam bentuk aset tetap berupa tanah telah diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 61 (Revisi 2010), "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah". Biaya aset tetap terkait biaya perbaikan dan pemeliharaan telah dicatatkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sedangkan pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan telah ditanamkan kedalam akun-akun yang mengalami pemugaran dan penambahan tersebut. dibukukan pada tahun yang bersangkutan.

Hibah pemerintah yang diterima oleh PT Bank Lampung termasuk hibah non moneter pada nilai wajar, tidak dapat diakui sampai terdapat keyakinan bahwa:

1. PT Bank Lampung menaati kondisi yang terdapat pada hibah tersebut; dan
2. Hibah tersebut diterima.

Hibah tanah yang diterima dari pemerintah daerah Lampung Timur dicatat sebesar nilai wajarnya dan dicatat dalam laporan posisi keuangan sebagai pendapatan ditangguhkan pada akun liabilitas lain-lain. Pencatatan tersebut akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain selama masa manfaat bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut.

**Tabel 1. Liabilitas lain-lain**  
**Liabilitas lain-lain**

<b>2020</b>	
Akun ini terdiri dari:	
1) Kliring Masuk	48.660.065.499
2) Biaya yang masih harus dibayar	37.719.878.714
3) Pendapatan ditangguhkan	
4) Perantara penyelesaian RTGS	
5) Liabilitas Aset Hak Guna	97.143.134
6) ECL rekening administratif	
7) Lainnya	587.890.134
	393.576.144
	166.933.398
	3.754.447.858
<b>Jumlah</b>	<b>91.379.934.880</b>

Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan yang berasal dari hibah pemerintah berupa tanah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa manfaat bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut. Berdasarkan tabel diatas, PT Bank Lampung menerima hibah pemerintah berupa aset tanah sebesar Rp97.143.134,- pada tahun 2020.

Pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah yang dipilih oleh PT Bank Lampung adalah melalui pendekatan penghasilan dimana hibah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama satu periode atau lebih.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap tanah yang diperoleh dari hibah pemerintah pada PT Bank Lampung diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 61 (Revisi 2010).
2. Pada tahun 2020, PT Bank Lampung menerima hibah pemerintah sebesar Rp97.143.134, melalui pendekatan penghasilan dimana hibah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama satu periode atau lebih.

**DAFTAR REFERENSI**

Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *PSAK No. 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*.

Indonesia, R. (2010). *Buletin Teknis SAP Nomor 13*. 1–413.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. (2020). *Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2020*. <https://banklampung.co.id/laporan/laporan-keuangan>

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Kencana.